

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Pembimbing I
Sadri, S.IP, M.So.Sc**

**Pembimbing II
Dewi Anggraini, S.IP, M.Si**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pemerintah Kota Padang. Rozi Putra Utama S (0910832022), Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 79 halaman, 2016.

Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Proses penerapan kebijakan oleh Pemerintah Daerah disini Pemerintah Kota Padang sebagai Implementor. Fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi dan memiliki korban dan kasus tertinggi di Sumatera Barat. Secara spesifik penelitian ini mengidentifikasi serta mendeskripsikan penerapan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tersebut serta upaya yang dilakukan dalam fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Padang tersebut. Teori yang digunakan yaitu teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan. Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Data yang ditemukan dianalisis dengan menggunakan analisis etik dan emik. Hasil penelitian ini menganalisa bahwa pemerintah Kota Padang belum berhasil melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang. Penyebab proses sosialisasi yang dilakukan baru sebatas tempat ibadah dan sekolah-sekolah dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Seperti agen pelaksana yang kurang, kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya program-program unggulan untuk sosialisasi untuk pencegahan narkotika, serta wilayah-wilayah di Kota Padang belum sepenuhnya terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan belum ada wilayah yang kebal dari narkotika.

Kata Kunci: Peraturan Menteri, Implementasi, narkotika Kota Padang

ABSTRACT

Implementation Regulation Of Ministry of Home Affairs Republic Of Indonesia Number 21 Year 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika By Goverment of Padang City. Rozi Putra Utama S (0910832022). Political Science, Faculty Social Science and Politics, University of Andalas, 79 page, 2016.

This thesis explain about implementation regulation of Ministry of Home Affairs Number 21 Year 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan narkotika. Process applying of policy by Local Government here Government Of Padang City as a Implementor. Preventive Fasilitas abuse of narcotic as protection of society of narcotic danger. Padang City as a capital of Provinsi and have highest case and victim in West Sumatra. Specially this research to identify and describe the application of these regulation of Ministry of Home Affairs Number 21 Year 2013 the and also strive performed within preventive fasilitation narcotic abuse by Government of Padang City. Used theory that is Van Metre theory and Van Horn about policy implementation. Type and approach of this research is qualitative with descriptive type. Technique data collecting with is the in-depth interview and documentation. Election of informan use method of purposive sampling. The data found were analyzed using analysis of ethics and emic. Result of this research is to analize that government of Padang City not yet made a success of preventive fasiltation of narcotic abuse in Padang City. Cause process applying socialization newly limited to religious service place and schools because of existence of some factor pursuing in course of applying of policy. Like less executor agent, condition of public economics , lack of pre-eminent programs for socialization for the prevention of narkotic, regional and also in Padang City not yet fully free from abuse of narcotic and there is no impenetrable region of narcotic.

Keywords: Ministry Regulation, Implementation, narcotic preventive